



## Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Mestor Lotam Apriadil Purba<sup>1\*</sup>, Sudarsana Arka<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Udayana, Indonesia

Email : [lotampurba60@gmail.com](mailto:lotampurba60@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sudarsanaarka@unud.ac.id](mailto:sudarsanaarka@unud.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** Economic development aims to improve the well-being of the population, as reflected in the increase of the Human Development Index (HDI). Although the HDI in the regencies/cities of Bali Province has risen, income disparity persists. Reducing income distribution inequality can be achieved by creating decent job opportunities, lowering unemployment rates, and providing adequate income to ensure a good quality of life for workers. The objectives of this study are (1) To analyse the simultaneous effect of unemployment, economic growth and human development index on income distribution inequality in regencies/cities in Bali Province. (2) To analyse the partial effect of unemployment, economic growth and human development index on income distribution inequality in regencies/municipalities in Bali Province. The data used is secondary data, with 117 observation points. The analysis technique used is panel data regression model technique. The results showed that (1) Unemployment, economic growth and human development index simultaneously affect the inequality of income distribution in regencies/cities in Bali Province. (2) Unemployment and economic growth have a positive effect but not significant on income distribution inequality, while the human development index has a negative and significant effect on income distribution inequality.

**Keywords:** Unemployment, Economic Growth, Human Development Index, Income Distribution Inequality.

**Abstrak:** Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali mengalami peningkatan, disparitas pendapatan masih ada. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikurangi dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, menurunkan tingkat pengangguran, dan memberikan pendapatan yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi para pekerja. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh simultan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Untuk menganalisis pengaruh parsial pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah titik pengamatan 117 titik pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik model regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2) Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

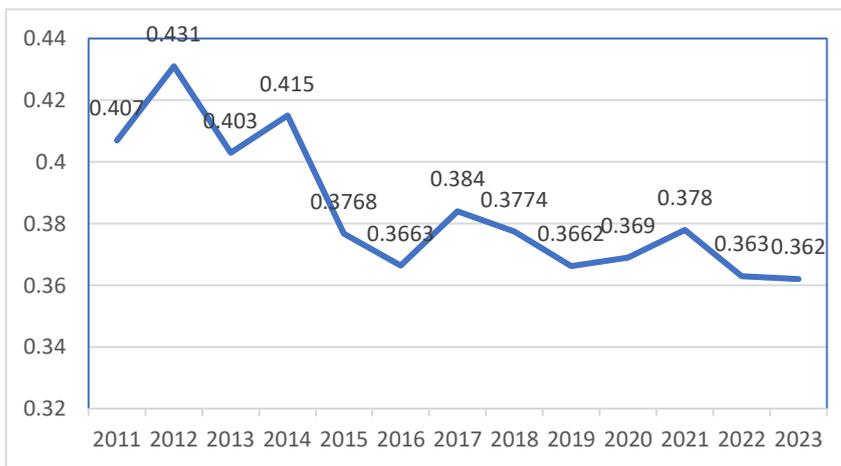
**Kata Kunci:** Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau dan mempunyai 38 provinsi. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing terdiri dari sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat serta jumlah penduduknya. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan sumber daya alam, sosial budaya dan adat istiadatnya yaitu Provinsi Bali.

Provinsi Bali memiliki kabupaten/kota terdiri dari Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Denpasar yang menjadi Ibu Kota.

Perbedaan pertumbuhan antar daerah ini diikuti dengan perbedaan pembangunan ekonomi sehingga membuat adanya ketimpangan pendapatan antar daerah. Ketimpangan distribusi antar wilayah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan lokasi geografis, variasi dalam sumber daya manusia, tingkat produktivitas, serta pendekatan dan strategi dalam pembangunan daerah, (Ali, 2013). Ketimpangan pendapatan ini dapat diukur menggunakan indikator *Gini Concentration Ratio* (GCR) atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Gini Ratio*.



**Gambar 1. Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Indeks)**

*Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, 2023*

Jika dilihat pada Gambar 1 data *gini ratio* Provinsi Bali, nilai *gini ratio* berkisar antara 0 hingga 1. Nilai *gini ratio* mendekati angka 0 memiliki arti terdapat pemerataan pendapatan sedangkan nilai *gini ratio* mendekati angka 1 memiliki arti bahwa suatu daerah memiliki ketimpangan yang tinggi. Provinsi Bali memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini mengacu pada data yang bersumber dari BPS diukur menggunakan *gini ratio* pada tahun 2012 sebesar 0,431 dimana termasuk dalam kategori jenis ketimpangan sedang. Ketimpangan distribusi pendapatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dari 0,431 pada tahun 2012 menjadi 0,403 pada tahun 2013, namun kembali meningkat pada tahun 2014 sebesar 0,415 hingga pada tahun 2023 nilai *gini ratio* pada Provinsi Bali kembali menurun hingga 0,363 namun, ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali cenderung berada pada tingkat ketimpangan menengah. Semakin rendah angka rasio gini menandakan ketimpangan pendapatannya semakin merata, sebaliknya semakin tinggi angka rasio gini maka semakin tinggi ketimpangan pendapatannya.

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Menurut Mankiw (2018) Pengangguran mencakup mereka yang tidak bekerja, dapat bekerja, dan sulit untuk menemukan pekerjaan selama empat minggu pertama. Pengangguran ini dapat mempengaruhi produktivitas di suatu daerah, sehingga menyebabkan suatu daerah tidak berjalan optimal dan pertumbuhan ekonomi daerah itu akan tertinggal dengan daerah lain. Semakin tinggi tingkat pengangguran akan mengakibatkan tingginya ketimpangan pendapatan. Tingginya pengangguran menunjukkan kabar yang cukup buruk, karena tingginya angka pengangguran yang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pengangguran ini membuat jarak pemisah antara penduduk miskin dan kaya, sehingga membuat ketimpangan distribusi pendapatan melebar. Selain pendidikan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Ekonomi suatu daerah dikatakan bertumbuh/berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan, manfaat dari pertumbuhan tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah bisa dihitung dengan melihat atau mempertimbangkan PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar harga yang konstan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara merata dan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk semua sektor, akan membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di sektor-sektor tertentu dan tidak merata di semua daerah, maka akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih besar. Menurut Hajiji (2010) Kesenjangan pendapatan bisa ditentukan dengan melihat tingkat perkembangan pembangunan, keberagaman etnis serta kegagalan pemerintah. Raeskyesa *et al* (2019) dalam penelitiannya menyatakan ketimpangan pendapatan antar daerah yang terjadi di Provinsi Bali contohnya pembangunan ekonomi yang masih terpusat di daerah-daerah tertentu saja seperti di Badung dan Denpasar, dimana pada daerah ini pembangunan ekonominya lebih maju dibandingkan dengan 9 kabupaten lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui sumber daya manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan peluang kerja yang luas maka dapat meningkatkan pengangguran dan mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia (SDM) serta akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kualitas sumber daya manusia dapat berperan sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Faktor ini bisa diukur melalui indeks kualitas hidup atau

indeks pembangunan manusia, yang mencerminkan berbagai aspek kesejahteraan dan kemampuan individu, (Hariwan, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk dapat mengkalsifikasi apakah suatu negara dapat dikatakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup manusia, dengan menggunakan suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf dan pendidikan. Tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi produktivitas penduduk; IPM yang rendah akan menyebabkan produktivitas penduduk juga rendah. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya pendapatan. Sebaliknya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkatkan tingkat produktivitas penduduk dan akan meningkatkan tingkat pendapatan. Pendapatan yang rendah akan menyusahakan masyarakat untuk berpendidikan karena terbatas oleh biaya dan pendidikan yang rendah juga akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena ketatnya persaingan. Sehingga akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan dan akan berdampak pada tingkat pengangguran.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas penelitian ini dibuat untuk mengkaji lebih dalam mengenai apakah ada kemungkinan bahwa ketimpangan pendapatan ini berkaitan dengan perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi dan infrastruktur antar daerah yang maju dengan daerah yang kurang berkembang di Provinsi Bali serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengapa terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Pemecahan permasalahan ketimpangan bukan dengan tujuan agar semua masyarakat berada pada tingkatan yang sama, melainkan bagaimana caranya agar disparitas itu mengecil.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Menurut Sukirno (2006) ketimpangan distribusi pendapatan memiliki dua konsep utama dimana konsep tersebut adalah konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan suatu cara untuk mengukur ketimpangan melalui parameter dengan suatu nilai yang mutlak. Ketimpangan relatif adalah pengukuran yang membandingkan dengan besarnya pendapatan individu maupun kelompok masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima seluruh masyarakat.

## **Pengangguran**

Menurut Mankiw (2018) Pengangguran didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki pekerjaan, baik karena mereka sedang berhenti sementara dari pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan baru. Pengangguran berarti mereka tidak memperoleh pendapatan, dan semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak tenaga kerja yang tidak memiliki sumber penghasilan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan upah bagi golongan berpendapatan rendah, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketimpangan pendapatan (Sukirno, 2011). Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dan menciptakan lowongan kerja, guna memastikan pembagian pendapatan yang lebih merata.

## **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ini mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu (Jhingan, 2016). Todaro (2004) berpendapat bahwa dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini berubah menjadi negatif, dengan peningkatan pendapatan yang berpotensi mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

## **Indeks Pembangunan Manusia**

Salah satu keuntungan utama dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kemampuannya untuk menunjukkan bahwa sebuah daerah dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia meskipun pada tingkat pendapatan yang relatif rendah. Selain itu, IPM juga mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan yang besar mungkin memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap kemajuan pembangunan manusia jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut Kuncoro, yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (Kuncoro, 2010:117). Menurut Becker (dikutip dalam Tarmidzi, 2012), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Becker mengkaji peran pendidikan formal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diperoleh seseorang, semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja mereka. Hal ini sejalan dengan teori modal manusia, yang menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi disparitas pendapatan (Jhingan, 2016). Teori ini berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas individu. Dengan peningkatan pendidikan, pendapatan individu akan meningkat, yang pada gilirannya dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan pendidikan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

### **Teori *Human Capital***

Seiring dengan perkembangan teori modal manusia, konsep *human capital* dapat didefinisikan dalam tiga aspek utama. Konsep pertama melihat *human capital* sebagai aspek individual, yang mencakup kemampuan pribadi seperti pengetahuan dan keterampilan. Rastogi (2002) memperjelas bahwa *human capital* terdiri dari pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh individu. Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* adalah hasil dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai aktivitas pendidikan. Model ini berfokus pada *human capital* sebagai hasil dari akumulasi melalui proses pendidikan dan pengalaman (Alan et al., 2008). Konsep ketiga memandang *human capital* dari perspektif orientasi produksi. Menurut Jhingan (2016), pendidikan memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi disparitas pendapatan, karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

### **Teori Kuznet**

Simon Kuznets (1955) berpendapat bahwa dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan ekonomi, distribusi pendapatan akan membaik karena adanya proses pemerataan pendapatan. Fenomena ini dikenal sebagai kurva Kuznets, yang menggambarkan hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan selama proses pembangunan ekonomi. Kurva ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat meningkat pada tahap awal pertumbuhan tetapi diharapkan menurun pada tahap selanjutnya, seiring dengan kemajuan ekonomi dan peningkatan pemerataan “U-terbalik” (*inverted U curve*), karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan (Sanjaya & Saskara, 2022). Beliau berpendapat bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Dimana penelitian dengan metode kuantitatif memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian asosiatif atau hubungan merupakan penelitian yang memiliki tujuan

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pedapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## PEMBAHASAN

### Jumlah, Laju, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah

**Tabel 1. Jumlah, Laju, Kepadatan Penduduk, dan Luas Wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)			Laju	
	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Luas Wilayah ( $km^2$ )
Jembrana	164,08	163,76	327,85	1,93	849,13
Tabanan	235,24	234,09	469,34	0,95	849,31
Badung	275,16	274,35	549,52	0,13	398,74
Gianyar	262,70	261,26	523,97	0,95	364,35
Klungkung	107,17	106,83	214,01	1,94	313,96
Bangli	134,50	132,62	267,13	1,84	526,76
Karangasem	258,98	252,29	511,27	2,17	839,31
Buleleng	414,77	410,36	825,14	2,38	1.322,68
Denpasar	366,95	359,85	726,80	0,11	125,87
Provinsi Bali	2.219,60	2.195,45	4.415,06	1,28	5.590,15

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023)*

Pada Tabel 1. diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2022 sebanyak 4.415.064 orang yang terbagi di 9 Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada pada Kabupaten Buleleng, diikuti dengan Kota Denpasar dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 366.950 orang. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki yang paling sedikit berada pada Kabupaten Klungkung sebanyak 107.170 orang. Jumlah penduduk perempuan yang paling banyak berada pada Kabupaten Buleleng dengan jumlah perempuan sebanyak 410.360, diikuti Kota Denpasar dengan jumlah perempuan sebanyak 359.950, sedangkan jumlah Perempuan yang paling sedikit berada pada Kabupaten Buleleng sebesar 106.620.

**Deskripsi Variabel Penelitian**

**Pengangguran di Provinsi Bali**

**Tabel 2. Pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2023.**

Kabupaten /Kota	Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jembrana	2.95	1.59	1.39	0.67	1.41	1.44	4.52	4.11	3.94	2.52
Tabanan	2.25	1.73	1.73	1.79	1.45	1.29	4.21	3.94	3.83	2.64
Badung	0.48	0.34	0.33	0.48	0.46	0.40	6.92	6.93	6.87	2.72
Gianyar	1.43	1.93	1.52	1.02	1.61	1.46	7.53	6.90	6.78	2.96
Klungkung	1.94	1.39	1.69	0.94	1.47	1.57	5.42	5.35	1.96	1.29
Bangli	0.67	1.72	1.21	0.48	0.81	0.75	1.86	1.80	0.76	0.75
Karangasem	2.06	2.15	1.68	0.72	1.03	0.62	2.42	2.32	3.09	2.61
Buleleng	2.74	2.04	2.27	2.41	1.88	3.12	5.19	5.38	5.20	3.60
Denpasar	2.32	3.54	3.23	2.63	1.87	2.29	7.62	7.02	5.08	2.85
Provinsi										
Bali	1.90	1.99	1.89	1.48	1.40	1.57	5.63	5.37	4.80	2.69

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tabel 2. dapat dilihat persentase pengangguran di berbagai kabupaten/kota pada Provinsi Bali dari tahun 2011 hingga 2023. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 persentase pengangguran Provinsi Bali sebesar 2,95%, kemudian menurun hingga 1,83% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 persentase pengangguran Provinsi Bali kembali meningkat hingga 1,90%, dan pada tahun 2015 persentase pengangguran Provinsi Bali sebesar 1,99%. Persentase pengangguran Provinsi Bali kembali menurun hingga 1,57% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup tinggi hingga 5,63%. Pada tahun 2023 persentase pengangguran di Provinsi Bali menurun menjadi 2,69%.

**Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali**

**Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2023.**

Kabupaten /Kota	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)
--------------------	--

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jembrana	6.05	6.19	5.96	5.28	5.59	5.56	-4.98	-0.65	2.98	3.66
Tabanan	6.53	6.19	6.14	5.37	5.71	5.58	-6.17	-1.98	2.93	3.56
Badung	6.98	6.24	6.81	6.08	6.73	5.81	-16.55	-6.74	9.97	11.29
Gianyar	6.80	6.30	6.31	5.46	6.01	5.62	-8.39	-1.05	4.04	5.06
Klungkung	5.98	6.11	6.28	5.32	5.48	5.42	-6.38	-0.23	3.12	4.70
Bangli	5.83	6.16	6.24	5.31	5.48	5.45	-4.10	-0.33	2.80	3.50
Karangasem	6.01	6.00	5.92	5.06	5.44	5.50	-4.49	-0.56	2.58	3.10
Buleleng	6.96	6.07	6.02	5.38	5.60	5.51	-5.80	-1.27	3.11	3.64
Denpasar	7.00	6.14	6.51	6.05	6.42	5.82	-9.44	-0.92	5.02	5.69
Provinsi										
Bali	6.73	6.03	6.33	5.56	6.31	5.60	-9.34	-2.46	4.84	5.71

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tabel 3. dapat dilihat data pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2011 hingga 2023 yang dapat memberikan wawasan yang penting mengenai tingkat kemakmuran relatif di berbagai wilayah. Dari data ini, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Dapat dilihat pada tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali masih dalam kondisi positif diatas 5%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tinggi hingga negatif 9% (Aprillianti & Utama, 2023).

## Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali

**Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2015-2023.**

Kabupaten /Kota	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Jembrana	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36	72,75	73,58	74,04
Tabanan	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17	76,45	76,75	77,43	

Badung	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83	82,13	83,08
Gianyar	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14	77,36	77,70	78,39	79,24
Klungkung	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73	71,75	72,55	73,11
<b>Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota</b>									
<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Klungkung	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73	71,75	72,55	73,11
Bangli	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36	69,37	70,26	70,79
Karangasem	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35	67,36	68,28	68,91
Buleleng	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30	72,55	72,56	73,45	73,97
Denpasar	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68	83,93	84,03	84,37	84,73
Provinsi Bali	73,30	73,60	74,30	74,80	75,38	75,50	75,69	76,40	77,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023)

Pada tabel 4. dapat dilihat terkait data Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2011-2023, pada tahun 2011 Kota Denpasar menjadi yang tertinggi diantara 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan nilai IPM 80.00, kemudian disusul oleh Kabupaten Badung dengan nilai IPM 72.00, sedangkan Kabupaten Karangasem memiliki nilai IPM paling rendah sebesar 62.00. Pada tahun 2012 Kota Denpasar masih menjadi yang tertinggi dengan nilai IPM 80.45, kemudian disusul oleh Kabupaten Badung dan Gianyar, sementara Kabupaten Karangasem memiliki IPM terendah dengan nilai 62.95. Pada tahun 2013 hingga 2023 Kota Denpasar masih memiliki IPM tertinggi dengan nilai IPM pada tahun 2023 sebesar 84.73, sementara Kabupaten Karangasem tetap memiliki IPM terendah selama 10 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2023 dengan nilai IPM pada tahun 2023 sebesar 68.91.

## Rasio Gini di Provinsi Bali

Tabel 5. Rasio Gini pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2023.

<b>Rasio Gini Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota</b>													
<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jembrana	0.40	0.37	0.37	0.39	0.31	0.36	0.32	0.33	0.29	0.35	0.32	0.33	0.33

Tabanan	0.36	0.35	0.39	0.40	0.36	0.34	0.31	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.35
Badung	0.34	0.33	0.35	0.34	0.31	0.32	0.32	0.34	0.32	0.32	0.33	0.32	0.28
Gianyar	0.33	0.34	0.33	0.38	0.32	0.30	0.27	0.31	0.29	0.32	0.33	0.31	0.32
Klungkung	0.38	0.35	0.36	0.35	0.37	0.36	0.37	0.39	0.38	0.36	0.35	0.35	0.34
Bangli	0.27	0.31	0.31	0.33	0.38	0.35	0.30	0.31	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28
Karangasem	0.29	0.29	0.33	0.34	0.31	0.29	0.32	0.34	0.31	0.33	0.32	0.30	0.34
Buleleng	0.34	0.33	0.38	0.39	0.34	0.34	0.31	0.34	0.28	0.29	0.28	0.28	0.31
Denpasar	0.34	0.42	0.36	0.38	0.36	0.33	0.34	0.34	0.35	0.33	0.38	0.37	0.34
Provinsi Bali	0.41	0.43	0.40	0.42	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.36	0.36

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023*

Berdasarkan Tabel 5. angka rasio gini pada tahun 2011 hingga 2023, terlihat bahwa angka gini rasio di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2012 di Kota Denpasar, diikuti oleh tahun 2014 di Kabupaten Tabanan. Sementara itu, tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan tingkat ketimpangan tertinggi di Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2021 hingga 2022 ketimpangan yang tertinggi berada pada Kota Denpasar, sedangkan tahun 2023 ketimpangan Kabupaten Tabanan kembali menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali sebesar 0,35 diikuti oleh Kota Denpasar dengan ketimpangan sebesar 0,34 dan Kabupaten Klungkung sebesar 0,34.

## **PEMBAHASAN HASIL**

### **Pengaruh Simultan Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2011-2023.**

Hipotesis pertama adalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil  $F_{hitung}$  sebesar 8,224, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa pengangguran ( $X_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) dan indeks pembangunan manusia ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil ini memiliki makna bahwa pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

### **Pengaruh Parsial Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2023.**

Hasil menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menandakan bahwa tinggi rendahnya pengangguran tidak akan mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan selain dari pekerjaan, seperti pendapatan dari investasi, warisan, atau bisnis. Pendapatan utama yang berasal dari sumber-sumber ini, Pengangguran cenderung tidak berdampak besar pada ketimpangan pendapatan secara keseluruhan karena banyak pengangguran bergantung pada dukungan keluarga atau harta/warisan mereka di Provinsi Bali. Hal ini membantu mengurangi efek pengangguran pada distribusi pendapatan, Hindun, et al., (2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviatamara et al. (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian Hindun, et al., (2019) juga mendapatkan hasil bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun berbeda dengan penelitian Yusica et, al (2018) dan Khoirudin & Musta'in (2020) yang berjudul “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### **Pengaruh Parsial Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2023.**

Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi bisa terjadi secara tidak merata di berbagai sektor atau wilayah. Jika sektor-sektor yang tumbuh pesat tidak melibatkan sebagian besar populasi atau jika pertumbuhan terpusat di daerah tertentu, ketimpangan pendapatan bisa tetap tinggi atau bahkan meningkat meskipun ekonomi secara keseluruhan tumbuh.

Hal ini sejalan dengan penelitian Raeskyesa et al (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan waktu untuk bisa menekan angka ketimpangan pendapatan, karena pertumbuhan ekonomi mungkin tidak merata pada seluruh daerah atau kelompok Masyarakat. Dimana, daerah-daerah tertentu sudah berkembang pesat sementara daerah-daerah lainnya tetap stagnan atau menurun. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian

Arafah & Khoirudin (2022) dan Nadya & Syafri. (2019) yang berjudul “Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia”. Dengan hasil variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam penelitiannya Arafah, & Khoirudin, (2022) menjelaskan di Provinsi Bali Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota, yang memiliki potensi sektor perekonomian yang berbeda-beda, sering kali menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota tersebut, terutama di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh variasi dalam potensi ekonomi dan struktur sektor perekonomian masing-masing daerah, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam dampak pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pauzi & Budiana (2016) dan Adipuryanti & Sudibia (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

#### **Pengaruh Parsial Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2023.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Koefisien regresi dari variabel indeks pembangunan manusia sebesar 0,005 memiliki arti bahwa dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia sebesar satu persen, mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2011-2023 menurun sebesar 0,005 persen, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hartini (2017) dan Yoertiara & Feriyanto (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.”, menemukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, hasil ini sejalan dengan teori *human capital* dimana pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Jhingan, 2016). Meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan peluang bersaing di pasar kerja dan potensi pendapatan yang lebih baik. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Penelitian Alvan dan

Arzu (2007) menunjukkan bahwa untuk mencapai GDP dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi serta kesenjangan yang lebih rendah, prioritas harus diberikan pada peningkatan IPM dalam program pembangunan. Pada penelitian Anggina & Artaningtyas (2017) dan Nilasari & Amelia (2022) menemukan hasil yang berbeda bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### **Implikasi Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai hubungan dari pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2023. Ketimpangan distribusi pendapatan pada dasarnya, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, beberapa implikasi dapat diuraikan sebagai berikut.

Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2023. Tidak berpengaruhnya pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti bantuan sosial yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2023. Hal ini terjadi karena keunikan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dimana pada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki potensi dalam sektor pariwisata sedangkan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem yang memiliki potensi dalam sektor pertanian.

Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2023. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik, serta mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin. Selain itu, peningkatan kesehatan memudahkan masyarakat untuk lebih produktif dalam pekerjaan mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan harian. Dengan demikian, ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah disusun, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah sebaiknya meningkatkan infrastruktur dasar seperti transportasi, kesehatan, dan fasilitas umum agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, serta fokus dalam pengembangan sektor-sektor yang berpotensi tinggi dalam menciptakan lapangan kerja baru, seperti teknologi, industri kreatif, dan sektor hijau.
- 2) Pemerintah hendaknya memberikan program pelatihan serta, masyarakat juga memiliki motivasi tersendiri untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adipuryanti, N., L., P., Y., & Sudibia., I., K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 9(1), 20–28.
- Aguenane, N. E. (2020). Regional Disparities In Human Development: The Case Of Moroccan Regions. *Innovation Journal of Social Sciences and Economic Review*, 2(2), 28-34.
- Alan, K. M. A., Altman, Y., & Roussel, J. (2008). Employee Training Needs and Perceived Value of Training in the Pearl River Delta of China: A Human Capital Development Approach. *Journal of European Industrial Training*, 32 (1), 19-31.
- Ali, Hasnah, Er, A.C., Ahmad, A.R., Lyndon, N., Ahmad, Sanep. (2013). An Analysis of the Impact of Foreign Investment on Regional Disparities: A Case of Malaysia. *Asian Social Science*, 9(14).
- Alvan, Arzu. Forging a Link Between Human Development and Income Inequality: Cross-Country Evidence. *Review of Social, Economic and Business Studies*, Vol.7/8, 31-43.
- Anggina, D., & Artaningtyas, W., D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap

- Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 15(1), hal 1-154.
- Arafah, M, & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), hal. 628-636.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. (2023). Tabel Dinamis Indikator Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. (2023). Tabel Dinamis Subjek Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. (2023). Tabel Dinamis Subjek Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. (2023). Tabel Dinamis Subjek Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. (2023). Tabel Dinamis Subjek Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik.
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2015. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33 (1), hal. 20–28.
- Connoly, M. (2004). Human Capital and Growth in the Postbellum south: A Separate but Unequal Story. *The Journal of Economic History*. 64 (2), hal. 363-399
- Damarjati, R., & Murniati, K. (2018). Teori Human Capital dan Implementasinya di Sektor Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2 (1), hal. 70-78
- Desi, P. K. (2013). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2 (3), hal. 164-172.
- Efriza, U. (2014). Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur DiEra Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Malang.
- Frank, R. H., & Bernanke, B. S. (2007). *Principles of Microeconomics* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Glaeser EL. (2006). *Inequality* (B. R. Weingast, BR, Wittman, & DA (eds.)). Oxford University Press Inc.
- Hanifah, N., & Rachmawati, R. (2023). Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2020. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 304-317.

- Hajiji, (2010). *Pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2002- 2008*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hartini, N., T. (2017). *Pengaruh Pdrb Per Kapita, Investasi Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Diy Tahun 2011-2015*. *Jurnal Pendidikan dan ekonomi*, 6(6).
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenada Media Group (Kencana)
- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). *Pengaruh Pendidikan Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8 (3), hal. 250-265.
- Jhingan, (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Cetakan ke 13*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J., L. (2020). *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Tirtayasa Ekonomika*. 15(1).
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, R. & Huda, S. (2020). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3 (2), pp 91-99.
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan (Edisi Dua)*. Yogyakarta: STIEM YKPN.
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Ketujuh)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marhaeni, A. A. I. N., Dewi, I. G. A. M. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mochamad, F. R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mhubbin Syah. (2010). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nadya, A. & Syafri. (2019). *Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*. *Media Ekonomi*, 27 (1), hal. 37-52.
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). *Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2), 169–182.

- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP*, 4(1).
- Pratiwi, N., P., A. & Indrajaya, I., G., B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin studi Ekonomi*, 24(2), 220-233.
- Raeskyesa, D. G. S., Suryandaru, R. A. & Kadarusman, Y. B. (2019). “*Analysis on Growth Pattern and Economic Sectors in Bali Province*”. *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 11(2), 45-56.
- Rastogi, P. N. (2002). Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation. *Human Systems Management*, 21(4).229-240.
- Reza, E., P., Abdullah, Z. K. & Fatin, H. S. (2022). Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Pendekatan Data Panel 2016-2020. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*.
- Rosa, Y. Del, & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, 2(4), 41–52.
- Saputra, D. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *CR Journal*, 2 (1), hal. 1-18.
- Sarmanu, (2017). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*. Airlangga University Pers.
- Sinaga, M. (2020). Analysis of effect of grdp (gross regional domestic product) per capita, inequality distribution income, unemployment and hdi (human development index) on poverty. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2309-2317.
- Sjafrizal, S. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Subagia, I. G. N. K. A. & Utama, M. S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11 (12), hal. 1538-1548.
- Sudarwan, D. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suparman, S., & Muzakir, M. (2023). Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2251803.
- Syilviarani, A. T. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Todaro & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan) Jilid 1*. Erlangga.
- Utama, S. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: CV. Sastra.
- Wijayanti, E. S. & Aisyah, S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6 (2), hal. 534-540.
- Wijayanto, A. T., Rumagit, G., & Suzana, B. O. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Yanthi, N. P. S. P. & Sutrisna, I. K. (2021). Pengaruh IPM dan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10 (5), hal. 2193-2222.
- Yoertiara, R. F. & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1 (1), hal. 92-100.
- Yusica, L. V., Malik, N., & Arifin, Z. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. *Ilmu Ekonomi*, 2, 230–240.
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Pers.